

# OMBUDSMAN GELAR FGD PENGADAAN BUKU MELALUI DANA BOS

Rabu, 19 Juni 2019 - Dian Megawati Tukuboya

KORIDORZONE.COM, TERNATE-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggelar Focus Group Discussion sebagai salah satu rangkaian kegiatan Rapid Assessment (Kajian Cepat) Ombudsman dengan tema Efektivitas Pengadaan Buku Teks Utama melalui Dana BOS bertempat di meeting room Hotel Batik Ternate, Senin 17 Juni 2019.

Kegiatan ini melibatkan Kepala-Kepala SD dan SMP Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sebagai peserta, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sebagai narasumber.

Menurut Ombudsman, temuan-temuan dari hasil observasi periode Mei-Juni 2019 di Ternate dan Tidore secara garis besar masih ada orang tua siswa yang mengeluhkan pembelian buku tema maupun buku mata pelajaran (teks utama) sebagai pegangan siswa di rumah, karena masih ada beberapa sekolah yang tidak mengizinkan siswanya membawa pulang buku teks utama ke rumah dengan alasan rasio jumlah buku dan siswa belum 1:1.

"Alasan lain karena buku teks utama yang sering hilang dan rusak, sehingga siswa tidak diperkenankan membawa pulang", ungkap Muhammad Iradat, Asisten Ombudsman yang juga penanggung jawab kegiatan.

Menurutnya tujuan dari 20% Dana BOS digunakan untuk pembelian buku adalah tidak ada lagi pembebanan kepada siswa maupun orang tua terkait pembiayaan pembelian buku. "Sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS, 20% alokasi Dana BOS untuk pembelian buku adalah salah satu wujud pendidikan bebas biaya untuk satuan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun," ujarnya.

Selain itu Ombudsman juga menemukan masih ada praktek penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilakukan di beberapa sekolah yang sifatnya diwajibkan. Sampai ada temuan wawancara dengan beberapa siswa, jika tidak memiliki LKS, sanksinya tidak diikutsertakan dalam proses belajar mengajar.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, seharusnya tidak ada penjualan buku Lembar Kerja Siswa, karena Lembar Kerja Siswa adalah kewajiban guru untuk menyusunnya, bukan dibebankan kepada siswa dengan cara membeli.

Tujuan diadakannya diskusi ini untuk menilai seberapa efektif pengadaan buku teks utama melalui 20% dana BOS yang dilakukan sekolah. Hasil dari Diskusi ini akan dideseminasikan sebagai bahan evaluasi baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun para Sekolah SD dan SMP di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. (naco)

Â